

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO.1 TAHUN 2009  
STUDI KASUS PADA KOPERASI UNIT DESA TENARA MUKTI DI UPT.VI  
SEI GARO DESA INDRA PURI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN  
KAMPAR.**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral komprehensif  
Sarjana lengkap pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Disusun Oleh:**

**SULIS TIANINGSIH  
NIM: 10673004930**

**PROGRAM SI  
JURUSAN AKUNTANSI (SI)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
RIAU  
2010**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO.1 TAHUN 2009 STUDI KASUS PADA KOPERASI UNIT DESA TENARA MUKTI DI UPT.VI SEI GARO DESA INDRA PURI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

**OLEH: SULIS TIANINGSIH**

*Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Unit Desa Tenara Mukti di UPT.VI Sei Garo yang berkedudukan di Desa Indra Puri kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa Tenara Mukti telah sesuai dengan PSAK NO.1. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara mengenai kegiatan usaha Koperasi yang berkaitan dengan piutang Koperasi dan data sekunder yaitu data yang sudah ada berupa: sejarah perkembangan Koperasi, Struktur organisasi dan laporan keuangan Koperasi.*

*Adapun Masalah yang ditemui penulis yaitu Koperasi melakukan penilaian piutang hanya sebesar nilai brutonya saja tanpa adanya pengurangan piutang tak tertagih, dan piutang yang disajikan di neraca tidak dibedakannya antara piutang anggota dan piutang non anggota. Dalam pencatatan penghapusan piutang menggunakan metode penghapusan langsung tetapi dalam penerimaan kembali piutang mencatat kas pada pendapatan lain-lain, Koperasi tidak mengungkapkan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun pada catatan atas laporan keuangan.*

*Dalam penilaian piutang seharusnya Koperasi melakukan penyisihan piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih dan di dalam penyajian piutang di neraca harus dibedakan antara piutang yang berasal dari anggota dan non anggota. Juga dalam pencatatan piutang yang dihapus diterima kembali dalam pencatatannya seharusnya mencatat piutang usaha pada biaya piutang tak tertagih dan pada saat perlunasannya seharusnya mencatat kas pada piutang usaha. Jadi jurnal koreksi yang seharusnya dibuat Koperasi adalah pendapatan lain-lain pada biaya piutang tak tertagih. Dan dalam pengungkapan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga dapat mempermudah Koperasi dalam mengidentifikasi piutang yang telah jatuh tempo dan membuat laporan keuangan lebih informatif lagi.*

*Kata kunci: Akuntansi Koperasi, PSAK No.1 tahun 2009.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9

### **BAB II      TELAAH PUSTAKA**

A. Pengertian Piutang .....	12
B. Klasifikasi Piutang .....	14
C. Penilaian Piutang .....	25
D. Penyisihan Piutang di Neraca dan Pengungkapannya .....	35

### **BAB III      GAMBARAN UMUM KOPERASI**

A. Sejarah Singkat Koperasi.....	40
B. Struktur Organisasi .....	41
C. Aktivitas Umum Koperasi .....	45

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penilaian Piutang .....	47
B. Penyajian piutang.....	51
C. Pengungkapan Piutang Yang Telah Jatuh Tempo .....	54

### **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat itu sendiri. Prinsip demokrasi yang demikian hanya dapat di implementasikan dalam wadah yang disebut dengan Koperasi yang berazaskan kekeluargaan. Dengan demikian, pentingnya ekonomi rakyat terutama kelompok masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi yang paling bawah (seperti petani, nelayan, dan pedagang kaki lima) akan lebih mudah diperjuangkan ekonominya melalui wadah Koperasi. Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 25 disebut bahwa peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokratis, kebersamaan kekeluargaan dan keterbukaan.

Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti disektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa transportasi, jasa asuransi dan jasa lainnya. Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Secara teknis akuntansi Koperasi merupakan kumpulan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi keuangan, sehingga di

mungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam Koperasi diidentifikasi dan diukur, kemudian diproses (pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran), dan hasilnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, baik pihak intern maupun pihak ekstern.

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan Koperasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang penting dan utama kepada pemakainya. Dari laporan keuangan para pemakai dapat mengetahui posisi keuangan Koperasi selama periode tertentu. Agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas maka harus disusun menurut prinsip akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sehingga para pemakainya dapat memahami laporan yang disajikan.

Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya, dimana Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan, dimodali, dibiayai diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Hal lain yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lain adalah anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengendali kegiatan oprasionalnya, sedangkan badan usaha lainnya berdasarkan penguasaan jumlah saham yang dimiliki. Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi dan kerjasama

antara satu Koperasi dengan yang lainnya, sedangkan badan usaha yang bukan Koperasi sering bersaing dengan yang lainnya.

Perlakuan akuntansi Koperasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar penyusunan laporan keuangan Koperasi dikenal dengan PSAK No. 27 yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha Koperasi serta konsep dasar susunan dan penyajian laporan keuangannya. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui Koperasi ini, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan secara tidak langsung dapat memperbaiki kehidupan masyarakat melalui karya yang dilakukan bersama. Karena itu seharusnya anggota Koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Koperasi dikelola oleh seorang pengurus yang dipilih oleh anggota dalam suatu rapat anggota, dengan kata lain kekuasaan tertinggi berada dalam rapat anggota. Pengurus wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek-aspek yang ada dalam Koperasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari aspek keuangan yang terpenting dalam tata kehidupan Koperasi yang harus dipertanggung jawabkankan oleh pengurus kepada anggota Koperasi.

Laporan keuangan Koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu perkiraan yang ada dalam neraca Koperasi adalah piutang. Piutang adalah hasil dari transaksi penyerahan barang atau jasa kepada anggota maupun bukan anggota Koperasi. Menurut PSAK No. 27 penyajian piutang,

biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu piutang kepada anggota dan piutang kepada non anggota, karena dengan dipisahkannya piutang menjadi piutang anggota dan piutang non anggota akan mempermudah mengidentifikasi pendapatan anggota yang berasal dari penjualan kredit kepada anggota atau piutang anggota.

Pada umumnya item piutang merupakan pos yang paling besar dalam Koperasi. Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam hal mengatur masalah pokok Koperasi meliputi : (1) Pengakuan pengukuran piutang, (2) penilaian piutang, (3) penghapusan piutang, (4) penyajian piutang dalam laporan keuangan. Kekeliruan dalam pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengakibatkan kesalahan dalam menilai kinerja Koperasi yang berdampak kepada penilaian kemampuan mengurus Koperasi. Pengakuan, pengukuran dan penyajian pos yang ada dalam laporan keuangan harus disesuaikan dengan Standar Keuangan Koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti UPT VI Sei Garo berkedudukan di Jalan Anggrek No.9 Desa Indra Puri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Koperasi ini pada mulanya didirikan oleh anggota atas dasar kepentingan yang sama, dalam perkembangannya Koperasi sampai saat ini sudah mempunyai beberapa unit usaha, antara lain : Unit Usaha Waserda, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Sarana Produksi dan Produksi TBS/ pemasaran, Unit Usaha angkutan dan perawatan jalan.

Adapun tujuan pokok pendirian Koperasi ini adalah untuk menunjang kepentingan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, namun karena Koperasi ini

sudah terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bukan anggota Koperasi.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah orang-orang yang sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada Koperasi, terutama mereka yang mempunyai lahan sawit. Dalam menyusun laporan keuangan, KUD Tenara Mukti belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga masih terdapat ketidak sesuaian dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian pos yang ada dalam neraca khususnya piutang.

Berdasarkan PSAK No. 27 telah dijelaskan bahwa “ Hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak tertera secara khusus diatur dalam pernyataan ini termasuk akuntansi untuk unit usaha otonom Koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya”.

Dalam penelitian yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Tenara Mukti ditemukan beberapa permasalahan tentang piutang. Dari daftar neraca tahun 2008 dan 2009 jumlah dan jenis piutang menunjukkan jumlah sebagai berikut:



**Tabel I.1**  
**Kud Tenara Mukti**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2009**  
**(Dengan Angka-Angka Tahun 2008 Sebagai Pembanding)**

AKTIVA	31 DESEMBER 2009	31 DESEMBER 2008
AKTIVA LANCAR		
Kas	263,142,661	121,572,362
Bank	1,738,942	1,738,942
Piutang Usaha	622,506,650	433,478,400
Persediaan	93,693,260	75,908,710
Simpanan pada koperasi	12,580,500	
Jumlah AKTIVA LANCAR	993,662,013	642,698,414

**Sumber : Neraca Kud Tenara Mukti**

Dalam neraca, KUD Tenara Mukti melakukan penilaian akun piutang pada perkiraan aktiva lancar. Apabila dibandingkan dengan akun aktiva lancar lainnya, maka perkiraan akun piutang menempati urutan yang terbesar, yaitu 63% dari jumlah aktiva lancar.

Berdasarkan PSAK No.1 dijelaskan bahwa "*Pengukuran aset secara netto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, Penilaian keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus*".

Piutang merupakan aktiva lancar yang dapat direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aktiva tersebut tidak diharapkan untuk dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah priode pelaporan. Pada aktiva lancar piutang disajikan menjadi piutang usaha, sesuai dengan jenis usaha yang menimbulkan piutang tersebut diakui Koperasi ketika uang diberikan kepada anggota, sedangkan jumlah piutang yang diakui adalah sebesar pinjaman yang

diberikan atau sebesar nilai nominal penjualan kredit karena tidak adanya potongan. Sedangkan didalam neraca Koperasi, piutang dinilai berdasarkan nilai bruto tagihan dengan tidak memperhitungkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian, seperti piutang usaha yang disajikan pada neraca KUD Tenara Mukti sebesar Rp. 622,506,650 belum adanya pemisahan antara piutang anggota dan piutang non anggota. Sesuai dengan PSAK No.27 yaitu menyatakan bahwa dalam penyajian piutang harus dibedakan antara piutang anggota dan non anggota.

KUD Tenara Mukti dalam melakukan penghapusan dan pencatatan piutang menggunakan metode penghapusan langsung dimana pada akhir periode perusahaan tidak membuat taksiran piutang tak tertagih tetapi piutang baru diakui pada waktu diketahui bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Cara penyajian seperti itu tentu saja memberikan gambaran yang menyesatkan atas saldo piutang karena tidak menggambarkan jumlah piutang yang diharapkan dapat ditagih. Pada akhir tahun 2008 Koperasi menghapus piutang pada unit USP sebesar Rp 7.000.000,00 karena piutang tersebut telah ber umur lebih dari satu tahun. Berdasarkan pencatatan Koperasi tahun 2009 piutang yang telah dihapuskan diterima kembali sebesar Rp 7.000.000,00 yaitu dari anggota USP, maka pencatatan yang dilakukan Koperasi dengan mendeбет kas Rp.7.000.000,00 dan mengkredit pendapatan lain-lain Rp.7.000.000,00. Metode penghapusan secara langsung ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menghendaki adanya penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca, yang telah ditetapkan didalam PSAK No.1.

Pada penyajian piutang di neraca dimana Koperasi tidak mengungkapkan catatan atas laporan keuangan jumlah piutang usaha yang telah jatuh tempo. Seharusnya Koperasi Tenara Mukti mengungkapkan catatan atas laporan keuangan jumlah piutang usaha yang telah jatuh tempo sesuai dengan PSAK No.1 yaitu perusahaan harus mengungkapkan dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan, sub klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi perusahaan. Setiap pos di subklasifikasikan, jika memungkinkan sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada induk perusahaan, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO. 1  
TAHUN 2009 STUDI KASUS PADA KOPERASI UNIT DESA TENARA  
MUKTI UPT.VI SEI GARO DI DESA INDRA PURI KECAMATAN  
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalahnya adalah :

“Apakah penerapan akuntansi piutang pada KUD Tenara Mukti telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian adalah :

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan terutama mengenai akuntansi piutang pada KUD Tenara Mukti.
- b. Bagi KUD Tenara Mukti, dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan piutang.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lain yang ingin melakukan penelitian untuk masalah yang sama.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti yang terletak UPT VI Sei Garo Di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data kuisioner yang diperoleh melalui daftar pertanyaan dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun Koperasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi dan laporan keuangan Koperasi unit Desa Tenara Mukti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi mengenai aktivitas Koperasi, sejarah perkembangan Koperasi, kebijakan operasional serta kebijakan di bidang akuntansi.
2. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data yang dimiliki Koperasi seperti struktur organisasi, laporan keuangan Koperasi.

Data yang dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membandingkan antara dua data-data yang telah dikumpulkan tersebut dengan teori-teori yang relevan yang dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

### **4. Sistematika Penulisan**

Didalam pembahasan dari sekripsi nantinya, berikut akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang teori yang mendukung pembahasan penelitian ini seperti pengertian piutang, pengklasifikasian piutang, pengakuan piutang, pengukuran piutang dan penyajian piutang dalam laporan keuangan Koperasi.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Koperasi yang meliputi, sejarah singkat Koperasi, struktur organisasi dan aktivitas Koperasi.

BAB IV : Bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, mengenai pengukuran piutang, penilaian piutang, penyajian piutang dan pengungkapan dalam laporan keuangan Koperasi Unit Desa Tenara Mukti.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup dari penulis yang berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi Koperasi Unit Desa Tenara Mukti.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Piutang**

Pada masa sekarang ini transaksi penjualan banyak dilakukan oleh perusahaan secara kredit sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang atau jasa sampai diterimanya uang. Dalam tenggang waktu ini sipenjual mempunyai tagihan pada pihak pembeli. Disamping penjualan barang atau jasa, tagihan ini juga dapat timbul dari kegiatan yang lain seperti pemberian jaminan kepada karyawan, memberikan uang muka kepada anak perusahaan dan lain-lain.

Pada bagian perusahaan piutang merupakan unsur yang paling penting dalam neraca. Prosedur yang wajar, pengakuan dan pengukuran yang tepat serta pengendalian yang wajar terhadap piutang ini adalah merupakan hal yang paling penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan para pelanggan.

Dibawah ini terdapat beberapa pengertian piutang yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi. Namun dan begitu banyak pengertian piutang yang diungkapkan menunjukkan makna yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Skousen dan Albrecht dkk (2001:324) menyatakan bahwa : Piutang adalah perjanjian informal antara penjual dan pemberi kredit. Tidak ada kontrak formal yang dibuat dan tidak ada tingkat bunga tertentu pada piutang (jika pelanggan gagal untuk membayar dalam waktu tertentu). Menurut Mulyadi (2000:469) dalam bukunya memberikan penjelasan: Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu

tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Mardiasmo (2000:215) menyatakan piutang adalah: hak untuk menerima pembayaran sejumlah tertentu dari pihak yang berkewajiban membayar pada saat tertentu. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari hasil kegiatan usaha perusahaan berupa: Penjualan jasa, penjualan barang dagangan dan penjualan hasil produksi. Menurut Fahmi Basyaib (2007:79) piutang dapat dipandang sebagai Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Sedangkan menurut Rudianto (2008:224) menyatakan bahwa piutang adalah klaim perusahaan atas uang barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

Soemarso (2004:338) memberikan piutang sebagai berikut : Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada langganan-langganannya pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan langganan membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Menurut Fraser dan Aileen (2008:71) Piutang usaha adalah puitang dapat dipandang sebagai pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen.

Kieso dan Jerry dkk (2002:368) memberikan penjelasan bahwa piutang adalah: Klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak lainnya. Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Menurut Zaki Baridwan (2004:124) piutang adalah: Tagihan-tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis. Sedangkan menurut Kieso dkk (2008:344) memberikan pengertian piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan



lain-lain atas uang, barang atau jasa. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang diberikan sebagian dari operasi bisnis yang normal. Menurut Hanry Simamora (2000:228) piutang merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada pihak lain. Menurut Indryo Gitosudarmo dan Basri (2002:83) berpendapat bahwa piutang adalah merupakan aktiva dan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya penjualan kredit.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa piutang merupakan klaim atau tuntutan perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok, atas barang atau jasa yang diharapkan disesuaikan melalui penerimaan kas dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan sebagai akibat dari penjualan kredit.

Untuk memenuhi tujuan laporan Koperasi, maka piutang yang dari transaksi dipisahkan antara piutang yang berasal dari anggota dan yang bukan anggota.

## **B. Klasifikasi Piutang**

Dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam operasi bisnis normal, selain dari piutang dagang yang diperoleh dari penjualan secara kredit terdapat piutang lain seperti: piutang bunga, piutang kepada pegawai, atau pinjaman karyawan, pinjaman kepada manajer, serta pinjaman kepada perusahaan anak.

Sehubungan dengan pengklasifikasian piutang tersebut, menurut Standar Akuntansi Keuangan, "Akuntansi untuk Koperasi" dalam, Tuti Trisnawati (2009:93) memberikan pernyataan bahwa: Menurut sumber terjadinya piutang digolongkan dalam dua katagori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain.

#### **a. Menurut Sumber Terjadinya Piutang**

##### **1. Piutang Dagang**

Piutang dagang (*trade receivables*) merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan atau jasa dan biasanya berjangka waktu satu atau kurang dari satu tahun penyajian kreditnya merupakan persetujuan-persetujuan informal antara penjual dan pembeli yang didukung dengan dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur dan kontrak-kontrak penyerahan.

Dalam PSAK No. 1 menyatakan bahwa: Piutang dipisahkan kedalam piutang dagang, piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pembayaran dimuka dan jumlah lainnya.

##### **2. Piutang Bukan Dagang**

Merupakan klaim atau tagihan kepada pihak lain atas transaksi diluar kegiatan normal perusahaan. Zaki Baridwan (2004:125) menyatakan piutang bukan dagang meliputi seluruh piutang lainnya dan piutang dagang bukan dagang dapat timbul dari berbagai transaksi :

1. Penjualan surat berharga atau pemilikan selain barang atau jasa
2. Uang muka kepada pemegang saham, para kreditur, pejabat, karyawan dan perusahaan-perusahaan atlati
3. Setoran-setoran kepada debitur, perusahaan kebutuhan umum, dan intansi-intansi lain.
4. Pembayaran dimuka atas penjualan
5. Setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya
6. Tuntutan atau kerugian atau kerusakan.
7. Tuntutan atas rapat dan restitusi pajak.
8. Saham yang masih harus disetor.
9. Piutang deviden dan bunga.

Pada umumnya piutang bukan dagang didukung dengan persetujuan-persetujuan formal yang sering kali tertulis, dan harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

Diantara transaksi yang dapat disajikan sebagai piutang bukan dagang diantaranya adalah:

1. Persekot dalam kontrak pembelian
2. Klaim terhadap usaha pengangkutan untuk barang-barang rusak atau hilang.
3. klaim terhadap perusahaan asuransi atau kerugian-kerugian yang dipertanggungkan.
4. Klaim terhadap pegawai perusahaan.
5. Klaim terhadap restitusi pajak.

6. Tagihan terhadap pelanggan atau pengendalian tempat barang (Misalnya: botol, drum dll).
7. Uang muka pada anak perusahaan.
8. Uang muka pada pegawai perusahaan.
9. Piutang deviden
10. Piutang pesangon pembelian saham, dll

Sementara Kieso dkk (2002:386) menyatakan :

Piutang bukan usaha timbul dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis baik untuk membayar ataupun mengirimkan. Beberapa contoh piutang bukan dagang adalah:

1. Uang muka kepada staff dan karyawan.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito Untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian.
4. Deposito sebagai jaminan pelaksanaan kerja atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga
6. Klaim terhadap:
7. Perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan.
8. Tergugat dalam perkara hukum
9. Lembaga perintah untuk pengembalian pajak.
10. Perusahaan untuk pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang.
11. Kreditur untuk barang yang dikembalikan atau hilang.
12. Pelanggan untuk barang –barang yang dapat dikembalikan (krat, peti, dan sebagainya).

## **b. Menurut Bentuk perjanjian**

Stice dan Skousen dkk (2004:513) menyatakan bahwa bentuk perjanjian piutang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

### **1. Piutang Tak tertulis**

Meliputi semua piutang yang tidak didukung oleh surat perjanjian hutang piutang atau janji formal untuk membayarnya. Piutang ini biasanya piutang dagang.

### **2. Piutang wesel (*Notes Receivable*)**

Menurut Stice dan Skousen wesel tagih adalah : Janji tertulis tanpa syarat oleh pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.

Menurut Hanry Simamora (2000:245) mengemukakan piutang wesel sebagai berikut: Wesel (*note*) adalah janji tertulis untuk membayar jumlah uang tertentu pada saat tertentu dimasa yang akan datang.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan wesel tagih adalah klaim atau tagihan kepada pihak lain yang didukung oleh janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu dimasa yang akan datang. Semua wesel yang timbul dari transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan akan meliputi unsur bunga. Oleh sebab itu wesel dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni wesel bunga dan wesel tanpa bunga.

Wesel bunga ditulis sebagai janji untuk membayar jumlah uang nominal (*face Amount*) ditambah bunga dengan tarif tertentu, sedangkan wesel tak berbunga tidak menentukan suatu tarif bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi

beban bunga. Jadi nilai sekarangnya merupakan selisih antara jumlah nominal dan bunga yang dimasukkan dalam jumlah tersebut.

Rumus untuk menghitung wesel bunga adalah sebagai berikut (Henry Simamora (2000:247) : Nilai nominal  $\times$  tarif bunga per tahun  $\times$  waktu = Bunga.

Pengertian wesel tagih menurut Al Haryono dkk (2003:114) adalah sebagai berikut : wesel tagih adalah suatu janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

Dalam hal cek, jumlah itu harus dibayarkan atas permintaan seseorang atau perusahaan, atau si pembawa. Dokumen itu juga harus di tandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji tersebut. Pihak yang meminta agar wesel bayar disebut penerima pembayaran atau payee, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat.

Nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Nilai jatuh tempo dari suatu wesel bunga tanpa bunga adalah jumlah nominal (*face value*). Nilai jatuh tempo suatu wesel berbunga adalah jumlah nominal ditambah bunga.

### **c. Menurut Jatuh Tempo Pembayaran**

#### **1. Piutang Lancar (*Current Receivable*)**

Kieso dkk (2008:347) mengatakan: piutang lancar adalah semua piutang yang diidentifikasi dengan siklus operasi normal, yang mana lebih panjang. Artinya adalah bahwa piutang diharapkan berubah menjadi kas selama siklus

operasi normal suatu perusahaan atau dalam satu tahun, tergantung priode yang mana lebih panjang.

## 2. Piutang Tidak Lancar atau Jangka Panjang (*Non Current asset*)

Mencakup semua piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Piutang tidak lancar disajikan dineraca pos yang terpisah dari piutang lancar, biasanya dilaporkan dibawah judul investasi jangka panjang atau aktiva lain-lain jangka panjang.

### **d. Pengakuan Dan Pengukuran Piutang**

Pengakuan piutang berkaitan dengan pengakuan pendapatan atau dapat diartikan kapan suatu penjualan kredit diakui sebagai piutang. Dalam hal ini tidak termasuk konsinyasi. Akan tetapi diperlukan suatu kreteria untuk mengakui penjualan sebagai mana yang dijelaskan oleh Hendriksen (2000:173) sebagai berikut: Seperangkat kreteria yang lebih tepat untuk mengakui penjualan terdiri dari: (1) adanya bukti bahwa pembeli benar-benar ingin membeli dan penjual benar-benar ingin menjual, (2) identifikasi barang tertentu yang siap dijual, persetujuan antar pembeli dan penjual tentang harga atau rumus penetapan harga.

Sementara Kusnadi (2003:487) menyatakan piutang dari penjualan barang dagangan akan diakui pada hak milik atas barang berpindah dari penjual ke pembeli. Didalam hal ini pengakuan piutang biasanya berkaitan erat dengan syarat penyertaan barang yang diterapkan oleh perusahaan didalam menjual barangnya. Dalam akuntansi terdapat dua syarat penyerahan barang yaitu:

1. *FOB Shipping Point*

2. *FOB Destination*

Jika syarat penyerahan barang yang diberlakukan oleh perusahaan adalah *FOB Shipping Point*, maka hak milik atas barang akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli ketika barang tersebut telah dikirim ke alamat pembeli dan segala biaya yang terjadi selama pengiriman adalah tanggung jawab pembeli. Jadi pada saat yang bersamaan telah menimbulkan piutang atau dengan kata lain pengakuan piutang telah terjadi apabila adanya transaksi penjualan.

Sedangkan bila syarat penyerahan barang adalah *FOB Destination*, maka perpindahan hak atas barang baru terjadi saat barang benar-benar telah sampai digudang pembeli dan segala biaya yang terjadi selama pengiriman adalah tanggung jawab penjual akan berakhir setelah ada tanda bukti penerimaan dari pembeli. Misalnya:

Tanggal 10 Oktober dijual/dikirim kepada tuan Umar secara kredit sebesar Rp 1.000.000,- barang tersebut kembali diterima pembeli tanggal 12 Oktober. Berdasarkan data diatas, apabila *FOB Shipping Point* digunakan, maka piutang dicatat/diakui tanggal 10 Oktober dan apabila *FOB Destination* digunakan, maka piutang diakui tanggal 12 Oktober dengan pencatatan sebagai berikut :

Piutang usaha	Rp 1.000.000,-
Penjualan	Rp 1.000.000,-

Lazimnya piutang diakui pada jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar nilai pertukaran dari nilai aktiva atau barang yang dijual. Dalam hal pengakuan piutang, Kieso dkk (2008:348) memberikan penjelasan: Dalam berbagai besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Harga pertukaran (*the exchange price*) adalah jumlah yang terutang dari debitur (seorang pelanggan atau peminjam) dan



umumnya diberikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur (*invoice*). Dua faktor yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah (1). Ketersediaan Diskon (diskon dagang dan diskon tunai) dan (2) Lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran (unsur Bunga).

Pengukuran yang dilakukan harus lah memberikan penilaian dalam hal pertukaran barang dagangan sebagai dasar pencatatan piutang pada saat diakui dipengaruhi oleh:

- a) Potongan dagang (*trade discount*)
- b) Potongan tunai dan potongan penjualan (*cash discount*)
- c) Elemen bunga

### **1. Potongan dagang (*Trade Discount*)**

Pengertian dari potongan penjualan diungkapkan oleh Kieso dkk (2008:349) adalah: Potongan penjualan (*Trade Discount*) adalah selisih antara harga jual bruto atau harga jual menurut daftar harga (jual) yang dipublikasikan dibandingkan dengan harga yang sesungguhnya dibayar oleh pembeli sebelum dikurangi dengan potongan tunai.

Pemberian potongan dagang dilakukan oleh perusahaan bagi pelanggan yang membeli produknya dalam jumlah yang cukup besar. Pemberian potongan ini tergantung pada volume dan usaha dan besar kecilnya pesanan pelanggan. Piutang dicatat sebesar harga jual bersih, yaitu harga jual kotor dikurangi dengan suatu jumlah yang ditetapkan sebagai potongan dagang (biasanya dalam persentase).

Sebagai contoh perusahaan menetapkan harga jual persatuan produknya Rp 100.000,- potongan diberikan 10 % untuk pembelian diatas 10 unit produk. Jurnal yang dicatat terhadap pembelian sebesar 15 unit produk yang dibeli pelanggan pada waktu penjualan adalah :

	Piutang Dagang	Rp 1.350.000,-
	Potongan Dagang	Rp 150.000,-
	Penjualan	Rp 1.500.000,-

Perhitungan:

$$\text{Harga jual} = 15 \text{ unit} \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 1.500.000,-$$

(-) Potongan dagang sebesar 10%

$$= 10\% \times \text{Rp } 1.500.000,- = \underline{\text{Rp } 150.000,-}$$

$$\text{Jumlah yang dibebankan pada pembeli} = \text{Rp } 1.350.000,-$$

## 2. Potongan Tunai (cask Discount)

Potongan tunai adalah potongan penjualan yang diberikan kepada langganan apabila langganan tersebut dapat melunasi dalam masa potongan yang ditetapkan perusahaan. Ada dua metode yang lazim yang dipakai dalam hal pencatatan piutang dengan menggunakan potongan tunai, yaitu : (a) metode kotor, dan (b) metode bersih. Untuk pencatatan dengan menggunakan metode kotor maka potongan penjualan dilaporkan sebagai pengurangan atas penjualan didalam perhitungan laba rugi. Dan bila metode bersih yang digunakan maka penjualan dan piutang dicatat pada harga bersih, dan pada setiap potongan tunai yang tidak dimanfaatkan didebet diperkiraan piutang dagang dan di kredit ke perkiraan kehilangan potongan penjualan.

Potongan tunai diberikan oleh perusahaan adalah dengan tujuan untuk merangsang pelanggan membayar kontan setiap melakukan pembelian, jika pelanggan mendapat potongan tunai, maka potongan penjualan akan didebetkan sebesar selisih kas lalu piutang dagang dikreditkan.

Potongan tunai yang diberikan biasanya menggunakan syarat tertentu, seperti contoh 2/10 n/30, yang artinya bahwa pembeli akan mendapatkan potongan atas pembelian yang dilakukannya sebesar 2% jika pembayaran hutangnya kepada perusahaan dalam jangka waktu 10 hari setelah periode kredit dan jika pembeli tidak memanfaatkannya maka seluruh hutangnya harus dilunasi dalam waktu paling lama 30 hari setelah awal priode kredit untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.I dibawah ini:

Tabel II.I			
Ayat Jurnal Menurut Metode Kotor Dan bersih			
<u>METODE KOTOR</u>		<u>METODE BERSIH</u>	
Penjualan Rp 1.000.000,- syarat 2/10, n/30			
Piutang dagang	1000.000	Piutang dagang	1000.000
Penjualan	1000.000	Penjualan	1000.000
Pembayaran yang diterima dalam masa potongan			
Kas	980.000	Kas	980.000
Potongan penjualan	20.000	Piutang dagang	980.000
Piutang dagang	1.000.000		
Pembayaran yang diterima setelah masa potongan			
Kas	1000.000	Kas	1000.000
Piutang dagang	1.000.000	Piutang dagang	980.000
		Potongan penj.yang	20.000
		Tidak diambil	

**Sumber :** Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi ke delapan, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2004, hal. 143.

### 3. Elemen Bunga

Piutang idealnya diukur nilai sekarang, yaitu nilai yang didiskontokan dari yang akan diterima dimasa yang akan datang, sebab nilai nominal piutang bukan

nilai yang sebenarnya diterima bila dihitung suatu tingkat bunga tertentu. Pada umumnya jumlah bunga yang diperoleh dari piutang tersebut tidak material sehingga para akuntan memilih untuk mengabaikannya.

### **C. Penilaian Piutang**

Dalam hal penelitian, piutang harus dilaporkan pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi atau jumlah bersih yang diperkirakan akan dapat diterima dalam bentuk kas. Penilaian terhadap piutang bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan yang pantas untuk setiap periode dengan cara menetapkan nilai yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Untuk mengukur nilai tunai piutang maka diperlukan pengurangan piutang yang diperkirakan tidak tertagih dari jumlah keseluruhan piutang dagang yang ada dalam perusahaan.

#### **1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dalam Rudianto (2008:225) menyatakan bahwa: piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah kotor (nilai jatuh tempo) dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan piutang untuk piutang yang diragukan tidak dapat ditagih.

Adakalanya dapat dipastikan piutang kepada seorang debitur tertentu tidak dapat ditagih lagi, maka piutang tersebut harus dihapuskan dari pembukuan oleh perusahaan. Sebagai akibat dari penghapusan piutang langganan tersebut, maka saldo piutang tidak muncul lagi dalam rincian piutang, yang artinya bahwa saldo piutang tersebut dikeluarkan dan catatan piutang perusahaan dengan cara mengkreditnya.

Tidak ada satu pun kesatuan umum yang merupakan pedoman untuk menentukan kapan suatu piutang atau wesel tak tertagih. Kenyataan bahwa seorang debitur gagal untuk membayar kewajiban sesuai kontrak penjualan atau pun weselnya terpaksa ditolak pada tanggal jatuh tempo belumlah berarti bahwa hutang-hutang tersebut tidak dapat ditagih. Petunjuk lain adalah perusahaan debitur itu ditutup, si debitur kabur, penagihan berkali-kali terus saja gagal dan pembatasan penagihan oleh ketentuan undang-undang.

Menurut Soemarso (2004:339) untuk tujuan pelaporan maka penilaian piutang didasarkan pada: Piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang. Perbedaan disebabkan perusahaan telah mengurangi dari jumlah piutangnya, penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih.

Piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih dibebankan sebagai biaya. Dengan dasar penelitian itu, piutang didasarkan sebesar uang yang akan diharapkan akan kembali diterima dari piutang yang bersangkutan. Konsep penilaian demikian menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima dimasa mendatang.

Walaupun piutang telah dinilai sebesar jumlah bersihnya (setelah dikurangi penyisihan tak tertagih) namun biasanya kedua jumlah tersebut tetap disajikan. Dengan cara ini pembaca dapat mengetahui jumlah kotor piutang dan penyisihan yang dibuat untuk piutang tak tertagih. Dalam metode penyisihan setiap akhir priode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang. Biasanya

dalam menghitung penyisihan piutang tak tertagih ini ada dua dasar yang digunakan yaitu:

- a. Kerugian piutang dihitung atas dasar jumlah penjualan

Kerugian piutang dihitung dengan cara mengalik persentase tertentu dengan jumlah penjualan yang ada pada periode yang bersangkutan. Persentase tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman sebelumnya atas jumlah piutang yang telah dihapus. Karena piutang pada umumnya berasal dari penjualan kredit, maka perhitungan perkalian penjualan sebaiknya diambil dari penjualan kredit.

Misalnya: PT Tria Jaya pada tanggal 31 Desember 2009 mempunyai penjualan kredit sebesar Rp 55.000.000,- saldo cadangan piutang Rp 2.000.000,- persentase kerugian piutang ditetapkan 5% dari penjualan kredit. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah:

Beban Piutang tak tertagih	Rp 2.750.000,-
Penyisihan Piutang tak tertagih	Rp 2.750.000,-

Perhitungan :

$$\text{Persentase kerugian } 5\% \times \text{Rp } 55.000.000,- = \text{Rp } 2.750.000,-$$

$$\text{Jumlah cadangan kerugian piutang dineraca adalah} = \text{Rp } 4.750.000,-$$

- b. Kerugian piutang dihitung berdasarkan jumlah saldo piutang

Perhitungan kerugian piutang berdasarkan saldo piutang dikenal juga dengan ragu-ragu diambil dari rekening neraca. Didalam pendekatan neraca perhitungan dibagi menjadi :

1. Penetapan jumlah penyisihan dengan tingkat persentase tertentu dari saldo piutang yang beredar

Dengan menggunakan metode ini, jumlah piutang tidak tertagih adalah persentase dari jumlah saldo piutang pada akhir priode. Dalam cara ini jumlah penyisihan piutang diperoleh dengan cara mengalihkan saldo piutang dengan persentase tertentu, hasilnya merupakan penyisihan piutang tak tertagih yang diinginkan.

Misalnya pada tanggal 31 Desember 2009 PT Tria Jaya memiliki saldo piutang sebesar Rp 10.000.000,- dan rekening cadangan kerugian piutang menunjukkan Rp 30.000,- persentase kerugian piutang ditetapkan 1% dari saldo piutang. Untuk mencatat piutang pada tanggal 31 Desember 2009 dibuat jurnal sebagai berikut :

	Beban Piutang tak tertagih	Rp 70.000,-
	Penyisihan Piutang tak tertagih	Rp 70.000,-

Perhitungan :

Persentase kerugian 1% X Rp 10.000.000,-	Rp 100.000,-
Saldo penyisihan piutang tak tertagih	<u>Rp 30.000,-</u>
	Rp 70.000,-

Dalam estimasi biaya penyisihan piutang tak tertagih, metode persentase jumlah piutang ini akan memperhatikan pada estimasi biaya piutang tak tertagih pada akhir priode, jumlah ini dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih sebelumnya dan selisihnya adalah biaya penyisihan tak tertagih, piutang tak tertagih hasil baru pada priode berjalan.

## 2. Penetapan jumlah penyisihan dihitung dengan menganalisa umur piutang

Metode ini dikenal sebagai metode analisa umur piutang. Umur piutang adalah jangka waktu sejak tercatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat

dibuatnya daftar piutang. Pada priode ini piutang dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu menunggak dan yang tidak menunggak. Menunggak maksudnya adalah piutang yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh pelanggan, sedangkan piutang yang tidak menunggak adalah piutang yang sudah dibayar oleh pelanggan saat piutang tersebut jatuh tempo untuk dibayar. Misalnya PT Tria Jaya pada tanggal 31 Desember 2009 saldo rekening piutang menunjukkan jumlah sebesar Rp 10.000.000,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**PT. Tria Jaya**  
**Analisa Umur Piutang**  
**Per Desember 2009**

Nama	Jumlah	Belum menunggak	Menunggak		
			1-30 Hari (Rp)	31-60 Hari (Rp)	Lebih dari 60 Hari (Rp)
Sugiatno	2.500.000	2.000.000	500.000	-	-
Renal	1.000.000	-	-	1.000.000	-
Wagiran	2.500.000	500.000	-	-	2.000.000
Ratna	3.000.000	-	-	3.000.000	-
Wati	1.000.000	500.000	-	-	500.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.500.000</b>

Perhitungan kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur dengan persentase yang telah disusun sebagai berikut:



**Tabel II.3**  
**PT. Tria Jaya**  
**Taksiran Kerugian Piutang**  
**Per 31 Desember 2009**

Kelompok Umur	Jumlah (Rp)	Persentase kerugian piutang	Taksiran kerugian piutang (Rp)
Belum menunggak	3.000.000	0,1	3.000
Menunggak 1-30 hari	500.000	1,0	5.000
Menunggak 31-60 hari	4.000.000	3,0	12.000
Menunggak > 60 hari	2.500.000	5,0	125.000
Jumlah	10.000.000		145.000

Dari perhitungan diatas diperoleh kerugian piutang sebesar Rp 145.000,- namun jumlah tersebut bukanlah kerugian piutang yang dibebankan pada priode 2009. Kerugian piutang yang dibebankan pada priode 2009 adalah Rp 145.000 – 30.000 = Rp 125.000,- jurnal untuk mencatat kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Beban piutang tak tertagih	Rp 125.000
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 125.000

(mencatat beban piutang tak tertagih pada priode berjalan)

Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debitemnya meninggal, lari, bangkrut atau dikarenakan sebab-sebab lain, maka piutang tersebut harus dihapuskan dari rekening piutang.

Misalnya PT. Trian Jaya diatas memperoleh informasi bahwa langganan atas nama Neneng tidak dapat membayar hutangnya karena bangkrut. Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang ini dapat dibuat sebagai berikut:

Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 500.000,-
Piutang usaha	Rp 500.000,-

Apabila piutang pelanggan atas nama Neneng yang sudah dihapus diterima kembali pembayarannya maka jurnal yang dibuat adalah :

	Piutang usaha	Rp 500.000
	Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 500.000
	Kas	Rp 500.000
	Piutang usaha	Rp 500.000

## 2. Penghapusan Piutang tak tertagih

Ada dua metode penghapusan piutang-piutang yang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) dan metode cadangan (*allowance method*).

### a. Metode penghapusan langsung (*direct write-off method*)

Pencatatan kerugian piutang baru akan dilakukan pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Pada saat itulah diadakan pencatatan kerugian tersebut kedalam perkiraan piutang dibagian debet, serta mengkredit perkiraan piutang dagang dalam jumlah yang sama, guna mengeluarkan piutang piutang tidak tertagih dalam catatan. Metode penghapusan langsung merupakan metode yang disederhanakan dan mudah diterapkan. Namun dari prinsip matching, maka metode ini dianggap menyimpang dengan prinsip tersebut, yang menyatakan bahwa biaya-biaya harus dibandingkan bersamaan dengan pendapatan yang diperoleh dari periode yang bersangkutan. Bila perusahaan menggunakan metode ini, maka tidak akan ditemukan perkiraan penyisihan atau penaksiran-penaksiran jumlah piutang yang diperkirakan tidak tertagih. Penggunaan metode ini tidak dapat menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan

akan ditagih didalam neraca, karena dineraca menunjukkan jumlah piutang bruto (kotor).

Menurut Kusnadi (2000:115) menyatakan bahwa: metode penghapusan langsung ini mempunyai kekurangan karena dua alasan :

1. Metode tersebut tidak menetapkan penyisihan piutang tak tertagih,metode ini selalu melaporkan piutang pada jumlah penuhnya.
2. Metode tersebut tidak menandingkan beban piutang tak tertagih terhadap pendapatan yang baik

Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Hornggren (2007:444) bahwa: Dalam metode penghapusan langsung, piutang dagang yang tak tertagih baru diakui sebagai beban apabila bagian kredit menyatakan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Bila hal tersebut terjadi, maka bagian akuntansi akan mendeбет perkiraan beban piutang tak tertagih dan mengkredit piutang langganan yang dianggap tidak membayar utangnya.

Sedangkan menurut Warren (2005:401) menjelaskan bahwa:Metode penghapusan langsung (*direct write-off mehtod*), mengakui beban bahwa hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak tertagih lagi pada akhir priode, jadi akun penyisihan dan ayat jurnal penyusuaian tidak diperlukan pada akhir priode.

Sebagai ilustrasi pada tanggal, 30 mei 2008 piutang terhadap Tuan Hasan sebesar Rp 100.000,- yang berasal dari penjualan barang dagangan tahun 2007 ternyata benar-benar tidak dapat tertagih lagi. Karena yang bersangkutan telah dinyatakan palit. Jurnal untuk mencatat kasus ini adalah sebagai berikut :

30 Mei 2008

Beban piutang tak tertagih	Rp 100.000,-
Piutang usaha	Rp 100.000,-

Jika pelanggan ternyata membayar piutang yang telah dihapus itu dikemudian hari, maka piutang harus timbul kembali dengan membalik ayat jurnal penghapusan sebelumnya.

Pada tanggal 21 Oktober 2008 ternyata tuan Hasan membayar hutangnya sebesar Rp 60.000,-. Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat kejadian diatas

Piutang Usaha	Rp 60.000,-
Biaya piutang tak tertagih	Rp 60.000,-

(mencatat pengakuan kembali piutang yang telah dihapus)

Kas	Rp 60.000,-
Piutang Usaha	Rp 60.000,-

(mencatat perlunasan piutang)

b. Metode Penyisihan (*allowance method*)

Untuk menggunakan metode penyisihan (*allowance method*) pihak perusahaan setiap akhir periode akan dilakukan penaksiran terhadap piutang yang tidak tertagih untuk disisihkan dalam hal menjaga adanya kemungkinan tertagihnya piutang dikemudian hari. Metode ini mencatat pengumpulan kerugian-kerugian yang didasarkan pada taksiran-taksiran tertentu atas jumlah piutang yang tidak tertagih. Dalam hal pencatatannya penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan cara mendeбет beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Ada pun pencatan dari transaksi tersebut adalah:

	Beban piutang tak tertagih	Rp 150.000,-
	Penyisihan Piutang tak tertagih	Rp 150.000,-

Dan apabila piutang tak tertagih dicadangkan tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, maka jumlah tersebut dikeluarkan dari penyisihan piutang tak tertagih dan perkiraan piutang usaha. Dengan mendeбет perkiraan-perkiraan penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit piutang dagang sebesar jumlah yang benar-benar tidak tertagih, berikut ilustrasi jurnal yang dicatat dalam metode penyisihan adalah sebagai berikut: Pada tanggal 25 April 2008 saat melakukan penghapusan piutang terhadap tuan Rian sebesar Rp 150.000,-, dicatat dengan jurnal:

	Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 150.000,-
	Piutang usaha	Rp 150.000,-

Piutang usaha yang telah dalam akun penyisihan mungkin saja dapat ditagih dikemudian hari, jika itu terjadi piutang tersebut harus ditimbulkan kembali dengan ayat jurnal yang merupakan kebalikan dari ayat jurnal penghapusan. Yang diterima sebagai pembayaran harus dicatat sebagai penerimaan pembayaran piutang. Pencatatan tersebut adalah berikut :

Misalnya tanggal 19 Agustus 2008, dari ilustrasi diatas yang dibuat pada saat pengakuan piutang yang telah dihapus, dicatat dengan jurnal :

	Piutang usaha	Rp 150.000,-
	Penyisihan piutang tak tertagih	Rp 150.000,-
	Kas	Rp 150.000,-
	Piutang usaha	Rp 150.000,-

Dalam hal penetapan besarnya persentase piutang tak tertagih dapat dilakukan atas pengalaman masa lalu atau pun pengalaman dari perusahaan lain yang bergerak dibidang usaha yang sejenis.

#### **D. Penyisihan Piutang di Neraca dan Pengungkapan**

Piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa dan diharapkan perlunasannya kurang dari satu tahun disajikan sebagai aktiva lancar, dan dikelompokkan dalam piutang wesel, piutang pelanggan, pendapatan yang masih harus diterima dan piutang lain-lain.

Piutang dilaporkan dineraca sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Seperti yang dikatakan Ikatan akuntan indonesia di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 (2009:1.5) menjelaskan bahwa: Pengukuran aset secara netto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, Penilaian keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus.

Mardiasmo dan Halim (2000:216) menyatakan bahwa dalam pedoman penyajian piutang pada neraca memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Harus disajikan terpisah antara piutang dagang dan piutang bukan dagang.
2. Jika jumlah piutang dagang material (kira-kira 5% dari total piutang)  
Harus dirincikan
3. Disajikan piutang dagang menunjukkan jumlah bersih yang direalisasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Dalam PSAK No.27 (2009:27.10) menyatakan bahwa :

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat :

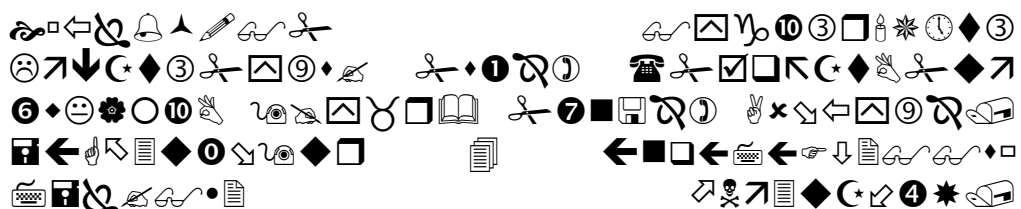
- a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :
  1. Pengakuan dan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan bukan anggota.
  2. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
  3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan bukan anggota.
- b. Pengungkapan informasi lain, antara lain :
  1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek atau yang telah dicapai oleh koperasi.
  2. Akuntansi koperasi dalam pengembangan sumberdaya dan mempromosikan ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pelatihan usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk mencapai anggota dan pencapaian lapangan usaha baru untuk anggota.
  3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
  4. Koperasi pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi dari anggota dan non anggota.
  5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibbah dan sumbangan.
  6. Asset yang dioperasikan oleh koperasi tetap bukan milik koperasi.

7. Asset yang diperoleh secara hibbah dalam bentuk pengalihan saham dan perusahaan swasta.
  8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
  9. Hak dan tanggungan hak pemodal modal penyertaan.
  10. Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi penyajian laporan keuangan.
- Wesel yang jatuh tempo dan biasanya dicatat sebagai piutang wesel yang menunggak.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.1 (2009:1.8) menyatakan sebagai berikut: Aset lancar mencakup aset seperti (persediaan dan piutang termasuk piutang usaha atau dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasi sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak dapat diharapkan untuk direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah priode pelaporan, dan harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

### E. Piutang Menurut Pandangan Islam

Dalam hal transaksi hutang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Al-qur'an (Al-Baqarah 02:282) yang berbunyi :





𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

sArtinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit*

*menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*  
(QS. Al-Baqarah : 282)

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KOPERASI**

##### **A. Sejarah Singkat Koperasi**

Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti di UPT. VI Sei Garo pada mulanya didirikan oleh anggota atas dasar kepentingan bersama, dimana anggotanya terdiri dari masyarakat transmigrasi yang diberikan lahan sawit oleh pemerintah sebanyak 2 Ha per kepala keluarga. Koperasi ini didirikan pada tanggal 14 Januari 1994 dengan jumlah anggota sebanyak 510 orang. Sampai akhir Desember 2009 jumlah anggota bertambah 12 orang menjadi 522 orang. Penambahan tersebut terdiri dari guru-guru yang ada di Desa Indra Puri, dengan Badan Hukum No.1833/BH/XIII. KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten kampar. Tujuan utama didirikan Koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai syarat awal untuk menjadi anggota, maka anggota wajib membayar simpanan pokok kepada Koperasi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan simpanan wajib yang dipotong setiap bulannya dari penjualan TBS untuk pengembangan Koperasi kedepannya, pengurus memupuk modal Koperasi dengan cara bekerja sama dengan PT. Rama Jaya Pramukti yang merupakan Perusahaan Mitra binaan Koperasi.

Dalam pengembangannya, Koperasi sampai saat ini sudah mempunyai beberapa unit usaha antara lain Unit Usaha Waserda, Unit Usaha Simpan Pinjam,

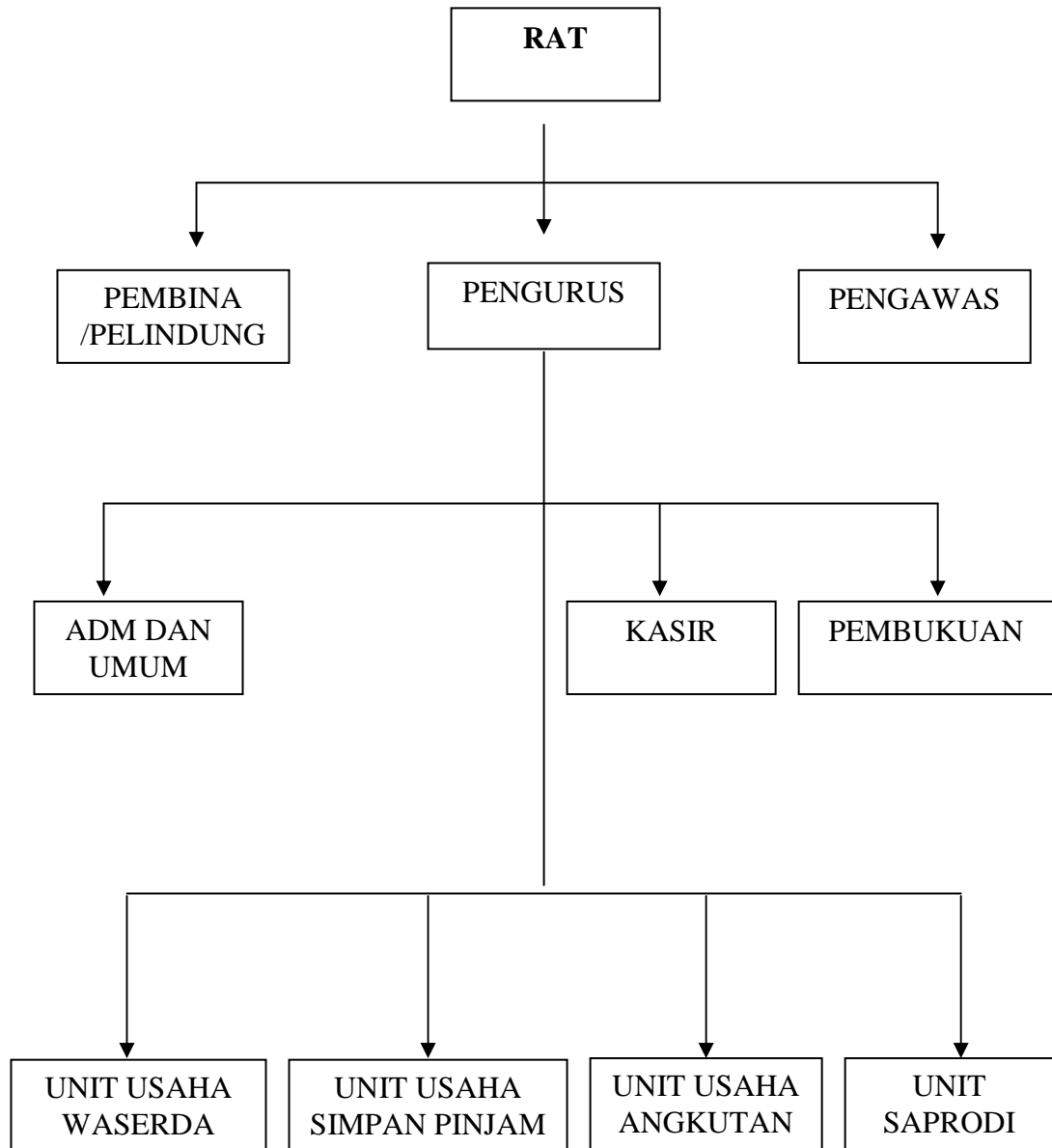
Unit Usaha Sarana Produksi dan Produksi TBS/ pemasaran, Unit Usaha angkutan dan perawatan jalan.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah kerangka atau bagan yang sangat penting karena mencakup garis pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam struktur organisasi tersebut akan terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari setiap orang yang ada di dalamnya.

Struktur organisasi Koperasi antara satu Koperasi dengan Koperasi lainnya adalah berbeda-beda, tergantung kepada besar kecilnya usaha Koperasi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun bentuk dari struktur organisasi Koperasi Unit Desa KUD Tenara Mukti dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar III.I : Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti Di UPT. VI Sei Garo**



Sumber : Kud Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo.

Sebagai mana disajikan dalam gambar, maka tugas dan wewenang Koperasi Unit Desa (KUD) Tenara Mukti masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

### 1. Rapat Anggota Tahunan

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Koperasi, maka Rapat Anggota Tahunan atau yang dapat disingkat RAT, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam RAT di tetapkan segala keputusan penting yang menyangkut organisasi, kelembagaan dan aktifitas Koperasi di masa yang akan datang. Adapaun fungsi RAT adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan atau menyelenggarakan RAT.
- b. Merumuskan kebijakan Koperasi
- c. Mengesahkan hasil laporan keuangan Koperasi
- d. Menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja, anggaran dasar serta program kerja Koperasi.
- e. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas Koperasi.

### 2. Pembina Dan Pelindung

Bertugas dalam melakukan pembinaan baik kepada Anggota, Pengurus, Badan Pengawas maupun kepada Karyawan Koperasi.

### 3. Pengurus

Pada Koperasi (KUD) Tenara Mukti, susunan pengurus terdiri dari ketua, Wakil ketua, Seretaris dan Bendahara yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengelola Koperasi secara bersama, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- b. Mengelola Koperasi dan Usahanya
- c. Mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja Koperasi

- d. Mengajukan laporan keuangan dan penanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Mengingat begitu banyak aktivitas-aktivitas usaha yang akan dijalankan oleh pengurus sejalan dengan perkembangan usaha Koperasi, maka pengurus dapat mengangkat beberapa orang karyawan untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

#### 4. Badan Pemeriksa / Pengawas

Badan Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan baik terhadap kinerja pengurus maupun dalam pengelola bidang usaha yang dimiliki Koperasi. Hasil dari pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada badan pelindung Koperasi dan disampaikan kepada Dinas Koperasi.

#### 5. Kasir

Kasir bertugas menerima serta mengeluarkan kas Koperasi, melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas.

#### 6. Pembukuan

Bagian ini bertugas membuat atau mencatat pembukuan Koperasi yang gunanya adalah untuk membuat Laporan Keuangan Koperasi.

#### 7. Administrasi dan Umum

Bertugas menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi Koperasi seperti membuat surat-surat dinas, membuat laporan tahunan dan lain-lain.



### **C. Aktivitas Umum Koperasi.**

Koperasi Unit Desa Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo mempunyai beberapa unit usaha antara lain:

#### **1. Unit Usaha Waserda**

Dalam Unit Usaha ini Koperasi melayani kebutuhan anggota berupa sembako (Sembilan Bahan Pokok) serta kebutuhan lainnya. Dengan sistem penjualan Tunai dan Kredit. Mengingat modal dirasa kurang mencukupi maka Koperasi pun mengadakan kerja sama dengan pihak ke tiga.

#### **2. Unit Sarana Produksi Dan Unit Produksi**

Dalam unit Usaha Sarana Produksi ini Koperasi melayani kebutuhan anggotanya berupa pupuk, obat-obatan hama penyakit, peralatan-peralatan tani, sedangkan dalam Unit Produksi untuk memberi kemudahan kepada Kelompok Tani dalam melayani dan mengelola hasil produksi anggotanya, berusaha untuk melengkapi seluruh proses administrasinya antara lain : Buku Nota Timbangan, Buku Hasil Panen, Buku Serah Terima Buah, Surat Pengantar Buah dan Buku Daftar Gaji Petani.

Untuk penyajian kebutuhan Sarana Produksi, Koperasi bekerja sama dengan berbagai pihak perusahaan dan pihak luar tergantung ketersediaan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan harga yang terjangkau serta sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan oleh pihak yang berkepentingan.

#### **3. Unit Usaha Angkutan dan Perawatan Jalan**

Pada unit usaha angkutan KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo telah terjalin kerja sama dengan pihak perusahaan Angkutan sebagai Kontraktor Yaitu CV. SUMBER URIP Pimpinan Bapak Ma'ruf.

Kemudian untuk perawatan jalan Koperasi masih tetap menjalankan tugas seperti biasanya dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam setiap pertemuan dan Rapat Rutin Bulanan dengan Pengurus Kelompok Tani, Yaitu:

- a. Jalan Indra Puri A dan Pangkas pelepah di kanan kiri jalan tersebut di kelola dan dirawat oleh Kelompok Tani
- b. Jalan Indra Puri B Jembatan dan Pangkas pelepah sawit yang ada di kanan kiri jalan tersebut, Pengelolaan dan Perawatannya menjadi tanggung jawab KUD Tenara Mukti Di UPT VI. Sei Garo.

#### 4. Unit Simpan Pinjam

KUD Tenara Mukti Di UPT. VI Sei Garo memberikan pinjaman kepada anggotanya dalam bentuk Usaha Simpan Pinjam, pinjaman diberikan tanpa ada jaminan tertentu. Jangka waktu pinjaman anggota tergantung dari kesepakatan awal, maksimal jangka waktu 12 bulan dengan bunga 1,5 % per bulan dari total pinjaman. Pengembalian pinjaman tersebut diangsur dengan cara memotong gaji anggotanya setiap bulannya. Untuk menambah permodalan dalam usaha ini Koperasi bekerja sama dengan pihak Perbankan dengan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan Perbankan tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab tiga telah dikemukakan bagian yang berhubungan dengan gambaran umum Koperasi Unit Desa Tenara Mukti, menyangkut sejarah singkat Koperasi, aktivitas Koperasi dan struktur organisasi. Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini penulis akan mencoba menganalisis penilaian piutang serta penyajian piutang yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Tenara Mukti.

#### **A. Penilaian Piutang**

##### **1. Penghapusan Piutang**

###### **a. Keadaan di Koperasi Unit Desa Tenara Mukti**

Pada Koperasi Unit Desa Tenara Mukti berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi, di katakan bahwa hal penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi KUD Tenara Mukti menggunakan metode langsung. Sehubungan dengan hal tersebut Koperasi Unit Desa Tenara Mukti melakukan Penghapusan piutang apabila terdapat piutang yang telah berumur lebih dari satu tahun atau pelanggan dinyatakan pailit setelah di lakukan peninjauan

Sebagai contoh Koperasi Unit Desa Tenara Mukti menghapuskan piutang tak tertagih pada tahun 2008 sebesar Rp 7.000.000,- dari Unit Usaha Simpan Pinjam karena piutang tersebut telah berumur lebih dari satu tahun, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

	Biaya Piutang tak Tertagih	Rp 7.000.000,-
	Piutang Usaha	Rp 7.000.000,-

Sedangkan pencatatan yang dilakukan apabila piutang usaha yang telah dihapuskan diterima kembali adalah sebagai berikut:

	Kas	Rp 7.000.000,-
	Pendapatan Lain-lain	Rp 7.000.000,-

Dengan melakukan pencatatan Seperti diatas maka akan menyebabkan distorsi atau penyimpangan atas laporan laba rugi dan neraca Koperasi, karena Koperasi tidak mencatat sebagai piutang tetapi pendapatan lain-lain sehingga pada pendapatan akan menjadi besar dan pada piutang tak tertagih mengalami pengurangan.

#### b. Analisis Penghapusan Piutang

Dari pencatatan diatas menyebabkan pada laporan laba rugi, khususnya pada penghasilan menjadi besar. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Tenara Mukti ketika menerima kembali piutangnya seharusnya adalah sebagai berikut:

	Biaya Piutang tak Tertagih	Rp 7.000.000,-
	Piutang Usaha	Rp 7.000.000,-

(mencatat pada saat penghapusan piutang )

	Piutang Usaha	Rp 7.000.000,-
	Biaya Piutang tak Tertagih	Rp 7.000.000,-

(mencatat pengakuan kembali piutang yang telah dihapus)

	Kas	Rp 7.000.000,-
	Piutang Usaha	Rp 7.000.000,-

(mencatat perlunasan piutang)

Jadi koresi untuk Koperasi Unit Desa Tenara Mukti atas pencatatan perlunasan piutang seharusnya adalah sebagai berikut:

	Pendapatan Lain-lain	Rp 7.000.000,-
	Biaya Piutang tak Tertagih	Rp 7.000.000,-

Dari catatan atas laporan keuangan dijelaskan piutang per 31 Desember 2009 setiap tahunnya di nilai sebesar nilai nominalnya, namun masih ada sebagian piutang yang tercantum di neraca tidak tertagih pada priode ini. Menurut PSAK sebaiknya Koperasi Unit Desa Tenara Mukti menggunakan metode penyisihan dalam menilai piutang yang disajikan dalam neraca, karena jumlah dari sebagian piutang yang tidak dapat ditagih tersebut akan sangat material dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan maupun dalam pengambilan keputusan bagi pengurus atau pemakai laporan keuangan Koperasi dalam menilai total aktiva.

## 2. Penyisihan Piutang tak tertagih

Pada Koperasi Unit Desa Tenara Mukti tidak membuat penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih, hal ini bisa diketahui di neraca, yang mana piutang dicatat sebesar nilai brutonya saja, tanpa adanya pengurangan untuk penyisihan piutang tak tertagih. Untuk mengetahui bagaimana kondisi piutang maka Koperasi dapat melakukan penaksiran piutang tak tertagih didasarkan pada:

1. Persentase tertentu dari jumlah penjualan
2. Persentase tertentu dari jumlah saldo piutang
3. Persentase tertentu dari jumlah yang didasarkan pada umur piutang.

Dalam hal melakukan perhitungan taksiran piutang tak tertagih didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah yang didasarkan pada umur piutang yang perhitungannya terdapat pada lampiran 1.

Berdasarkan perhitungan piutang tak tertagih, dengan menggunakan persentase tertentu dari jumlah yang didasarkan pada umur piutang yang terdapat pada lampiran 1. maka perhitungan kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur piutang dengan persentase yang telah ditentukan disusun sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**KUD Tenara Mukti**  
**Taksiran Kerugian Piutang**  
**Per 31 Desember 2009**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase Kerugian Piutang</b>	<b>Taksiran Kerugian Piutang</b>
Belum Menunggak	338,701,100	0%	0
Menunggak 1-30	20,676,500	1%	206,765
Menunggak 31-60	38,524,450	2%	770,489
Menunggak 61-90	122,164,300	5%	6,108,215
Menunggak 91-180	51,241,300	10%	5,124,130
Menunggak >181	51,199,000	20%	10,239,800
<b>Jumlah</b>	<b>622,506,650</b>		<b>22,449,399</b>

Sumber: Data Olahan

Pada akhir periode Koperasi dapat menghitung besarnya taksiran piutang tak tertagih untuk dilaporkan sebesar beban piutang tak tertagih dalam laporan rugi-laba dan penyisihan piutang tak tertagih yang dilaporkan di neraca sebagai lawan perkiraan piutang usaha.

Seharusnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Tenara Mukti melakukan pencatatan penyisihan piutang tak tertagih pada akhir tahun. Berdasarkan perhitungan kerugian piutang berdasarkan masing – masing kelompok umur piutang maka dapat di estimasikan piutang yang tidak tertagih adalah sebesar Rp 22,449,399,- Untuk itu pada akhir priode dibuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut:

Beban Piutang tak tertagih	Rp 22,449,399,-
Penyisihan Piutang Tak tertagih	Rp 22,449,399,-

Penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 22,449,399,- nanti akan tampak di neraca sebagai pengurang piutang.

## **B. Penyajian Piutang**

### **1. Piutang Anggota dan Non Anggota**

Pada KUD Tenara Mukti piutang yang di sajikan di neraca terdiri dari piutang usaha. Koperasi Unit Desa Tenara Mukti tersebut di neraca yang disajikan tidak dibedakannya antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas sesuai dengan PSAK No. 27. Berikut ini disajikan perhitungan piutang anggota dan piutang non anggota.

**Tabel IV.2: Piutang Anggota KUD Tenara Mukti di UPT VI. Sei Garo  
Tahun 2009**

<b>No</b>	<b>PERKIRAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Piutang Unit Simpan Pinjam	Rp 444,365,400,-
2	Piutang Waserda	Rp 62,070,250,-
3	Piutang Saprodi	Rp 78,503,100,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 584,938,750,-</b>

**Tabel IV.3: Piutang Non Anggota KUD Tenara Mukti di UPT VI. Sei Garo  
tahun 2009**

<b>No</b>	<b>PERKIRAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Piutang Unit Simpan Pinjam	Rp 23,279,900,-
2	Piutang Waserda	Rp 10,082,000,-
3	Piutang Saprodi	Rp 4,206,000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 37,567,900,-</b>

Dari data diatas, maka dapat dilakukan jurnal koreksi yang harus dibuat oleh koperasi adalah sebagai berikut:

	Piutang anggota	Rp 584,938,750,-
	Piutang non anggota	Rp 37,567,900,-
	Piutang Usaha	Rp 622,506,650,-



## 2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pada neraca KUD Tenara Mukti dalam penyajian piutang hanya disajikan sebesar jumlah kotornya saja. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PSAK No.1 yang menghendaki adanya penyajian piutang sebesar jumlah kotornya dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih atau jumlah kotor piutang tetap disajikan di ikuti dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Pada penyajian piutang dineraca sebaiknya koperasi KUD Tenara Mukti mengungkapkan piutang dengan taksiran yang menyebabkan tidak tertagihnya piutang, agar piutang yang disajikan dapat direalisasikan untuk ditagih atau jumlah kotor piutang tetap disajikan di ikuti dengan pengurangan penyisihan piutang tak tertagih. Penyajian piutang seharusnya dapat dilihat pada tabel IV.4:

**Tabel IV. 4**  
**KUD Tenara Mukti**  
**Aktiva Lancar**  
**Per 31 Desember 2009**

No	Aktiva Lancar	Jumlah
1	Kas	Rp 263,142,661,-
2	Bank	Rp 1, 738,942,-
3	Piutang Anggota Rp 584,938,750,- Piutang Non Anggota Rp 37,567,900,- Penyisihan Piutang Tak tertagih(Rp 22,449,399,-)	Rp 600,057,251,-
4	Persediaan	Rp 93,693,260,-
5	Simpanan pada Koperasi	Rp 12,580,500,-
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>Rp 971,212,614,-</b>

Sumber: Data Olahan

### C. Pengungkapan Piutang Yang Telah jatuh Tempo

Pada penyajian piutang di neraca di mana Koperasi Unit Desa Tenara Mukti tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah piutang usaha yang telah jatuh tempo. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan mengenai perlakuan akuntansi piutang yang menyatakan bahwa jumlah piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Seharusnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Unit Desa Tenara Mukti menyajikan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan tentang jumlah piutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel IV.5**  
**Daftar Piutang Yang Telah Jatuh Tempo**  
**Lebih Dari Satu Tahun**  
**Per 31 Desember 2009**

No	Nama	Alamat	Tgl Transaksi	Tgl Jatuh Tempo	Menunggak	Jumlah	Status
1	Kholid	Jl.Anggrek 1	30/11/08	29/12/08	1thn 2 hari	Rp 3,321,500	Anggota
2	Tamadi	Jl.Anggrek 1	13/11/08	12/12/2008	1 thn 19 hari	Rp 5,833,500	Anggota
3	Ajin	Jl.Anggrek 2	22/11/2008	22/12/08	1 thn 9 hari	Rp 9,000,000	Anggota
4	Sunardi	Jl.Anggrek 3	7/10/2008	6/11/2008	1 thn 1 bln 24 hari	Rp 9,333,300	Anggota
5	Asman	Jl.Anggrek 4	18/10/2008	17/11/2008	1 thn 1 bln 13 hari	Rp 4,600,000	Anggota
6	Carmo	Jl.Anggrek 5	10/11/2008	10/12/2008	1 thn 21 hari	Rp 4,000,000	Anggota
7	Nana.s	Jl.Anggrek 6	24/05/2008	23/06/2008	1 thn 6 bln 7 hari	Rp 7,500,000	Anggota
8	Nuryanto	Jl.Anggrek 7	15/11/2008	15/12/2008	1 thn 16 hari	Rp 7,610,700	Anggota
	<b>Total</b>					<b>Rp 51,199,000</b>	

Sumber: KUD Tenara Mukti

Dengan disajikannya daftar piutang yang telah jatuh tempo pada catatan atas laporan keuangan maka dapat mempermudah dalam mengidentifikasi piutang yang telah jatuh tempo, yang dalam hal ini akan membuat laporan keuangan lebih informatif lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan bab terdahulu maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan memberikan saran mengenai penerapan akuntansi piutang di Koperasi Unit Desa Tenara Mukti di UPT VI. Sei Garo yang mungkin bisa bermanfaat bagi Koperasi tersebut.

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menilai piutang usaha KUD Tenara Mukti menggunakan metode penghapusan langsung, dimana pada akhir priode akuntansi KUD Tenara Mukti tidak melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih, sehingga piutang yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2009 belum sejumlah nilai tunai yang dapat di realisasikan atau diharapkan dapat ditagih. Dan dalam penyajian piutang Koperasi Tenara Mukti belum memisahkan piutang anggota dan piutang non anggota hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota Koperasi serta tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan antara anggota dengan Koperasi.
2. Dalam melakukan penghapusan piutang Koperasi menggunakan metode penghapusan langsung, dan pencatatan yang dilakukan dalam menerima kembali piutangnya belumlah benar karena masih ada terdapat kekeliruan yaitu dalam

pencatatannya Koperasi mencatat kas pada pendapatan lain-lain. Sehingga pada laporan perhitungan hasil usaha dan neraca Koperasi akan mengalami penyimpangan.

3. Dalam pengungkapan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal Koperasi tidak mencantumkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

## **B. Saran**

1. Agar penilaian piutang usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka sebaiknya Koperasi menggunakan metode penyisihan untuk mencatat atau mengestimasi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat di tagih. Sehingga piutang yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dikurangi dengan taksiran piutang yang tak tertagih. Dalam metode penyisihan sebaiknya Koperasi menggunakan persentase yang didasarkan pada umur piutang. Semakin lama umur piutang usaha semakin rendah tingkat kolektivitasnya dan semakin tinggi persentase penyisihan piutang tak tertagih pada piutang tersebut. Dengan menggunakan dasar persentase ini maka diharapkan taksiran piutang tak tertagih jauh berbeda dengan penghapusan piutang yang dilakukan dan dalam penentuan persentase kerugian piutang di tetapkan berdasarkan pengalaman masa lalu berapa besar piutang tak tertagih. Dalam penyajian piutang di neraca sebaiknya Koperasi KUD Tenara Mukti memisahkan antara piutang anggota dan piutang non anggota.

2. Agar tidak terjadi penyimpangan pada laporan perhitungan hasil usaha dan neraca, sebaiknya koperasi melakukan koreksi pada pencatatan piutang yang telah dihapus diterima kembali yaitu pendapatan lain-lain pada biaya penyisihan piutang tak tertagih.
3. Agar pengungkapan piutang sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan, maka sebaiknya koperasi melakukan pengungkapan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun dalam catatan atas laporan keuangan yang dalam hal tersebut dapat mempermudah dalam hal mengidentifikasi seberapa besar jumlah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Baqarah 02:282.

Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Basyib, Fahmi, 2007, *Keuangan Perusahaan Permodalan Menggunakan Microsoft Excel*, Penerbit Kencana Penanda Media Group, Jakarta.

Fraser M. Lyn, dan Ormiston, Aileen, 2008, *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi Ke Tujuh, Penerbit PT Indeks, Jakarta.

Gitosudarmo, Indryo dan Basri, 2002, *Manajemen Keuangan*, Edisi ke Tiga, BPFE, Yogyakarta.

Hornggren, Harrison, 2007, *Akuntansi Di Indonesia*, Buku I, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hendriksen, Eldon S, 2000, *Teori Akuntansi*, Jilid 1, Edisi ke Empat, Terjemahan Marianus Sinaga, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Halim, Abdul dan Mardiasmo, 2000, *Auditing, Pembahasan Soal dan Teori dan Kasus*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Selemba Empat, Jakarta.

Jusup, Al Haryono, 2003, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi ke Enam, Jilid 1, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Keiso, Donal E. dan Jerry J. Weygandt, 2008, *Akuntansi Intermediate*, Edisi ke Delapan, Jilid 2, Binarupa Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2002, *Akuntansi Intermediate*, Penerjemahan Email Salim, Edisi Sepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kusnadi. H. Drs.Dkk, 2000, *Akuntansi Keuangan*, Penerbit UNIBPA, Malang.

Kusnadi, Lukman Syamsudin, Kertahadi, 2003, *Teori Akuntansi*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.

Mulyadi, 2000, *Pemeriksaan Akuntan*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2000, *Akuntansi Keuangan Dasar*, Edisi ke Tiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Rudianto, 2008, *Pengantar Akuntansi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soemarso, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku I, Edisi Kelima, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Simamora, Henry, 2000, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jilid I, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Stice, Eark K. Jtice D, James. Skousen Fred K, 2004, *Intermediate Accounting*, Buku 1, Edisi Lima Belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Skousen, K. Fed. Albrecht. W. Steve. Stice, D. James. Stice, K. Ear, 2001, *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama, Penerjemahan Thomson Learnang. Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Trisnawati, Tuti, 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Warren, Reeve Fress, 2005, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Dua Puluh Satu, Penerbit Selemba Empat, Jakarta..



## DAFTAR TABEL

I.1	Neraca KUD Tenara Mukti .....	6
II.1	Ayat Jurnal Menurut Metode Kotor Dan Bersih .....	24
II.2	Analisa Umur Piutang PT Tria Jaya.....	29
II.3	Taksiran Kerugian Piutang PT Tria Jaya .....	30
IV.1	Taksiran Kerugian Piutang KUD Tenara Mukti.....	50
IV.2	Piutang Anggota KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo Tahun 2009.....	52
IV.3	Piutang Non Anggota KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo Tahun 2009.....	52
IV.4	Aktiva Lancar KUD Tenara Mukti.....	53
IV.5	Daftar Piutang yang telah jatuh tempo lebih Dari satu Tahun.....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

III.I Struktur Organisasi KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo.....	42
--	----

## BIOGRAFI PENULIS



Sulis Tianingsih, lahir di desa Rambah Jaya 28 November 1988, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda yang bernama Sardi dan Ibunda Tumiyeem.

Pada tahun 1994 penulis mulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010, Desa Rambah Jaya dan tamat pada tahun 2000. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2000 penulis melanjutkan ke SLTP N 2 Rambah Hilir, Pasir pengaraian dan tamat pada tahun 2003 setelah tamat dari SLTP penulis melanjutkan ke SMK

PGRI Bangkinang di bangkinang dengan mengambil jurusan akuntansi dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Suska Riau dengan mengambil jurusan akuntansi di fakultas ekonomi dan ilmu sosial. Pada bulan juni penulis melaksanakan penelitian di Koperasi Unit Desa Tenara Mukti di desa Indra puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Judul “Analisis akuntansi piutang menurut PSAK No.1 tahun 2009 study kasus pada KUD Tenara Mukti Di UPT VI Sei Garo Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dibawah bimbingan Hj. Elisanovi, SE, MM, AK. Dan Andri Novius, SE, M.Si, AK. Berdasarkan hasil panitia ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKa Riau pada tanggal 28 Oktober 2010, penulis “lulus” dengan gelar sarjana ekonomi (SE).